

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI

*By* TRIWAHYUNINGSIH

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN

### DEMOKRASI

Triwahyuningsih

#### A. Pengantar

6

Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Secara historis, dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi di Indonesia, yakni Civics (1957/1962) Pendidikan Masyarakat yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan Kewargaan Negara, Civics dan hukum (1973) Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975/1984) dan PPKn (1994). Di tingkat Perguruan Tinggi pernah ada matakuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960 an), Filsafat Pancasila (1970- sampai sekarang), Pendidikan Kewiraan (1989- 1990 an) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000-sekarang ).

Pendidikan adalah proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada anak didik. Nilai-nilai itu disampaikan dan ditanamkan untuk membentuk karakter dan keperipihakan warga negara dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari baik kapasitasnya sebagai individu yang bebas otonom, maupun sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Pendidikan yang berhasil selalu dirumuskan dari sebuah pertanyaan fundamental : nilai-nilai apa yang akan disampaikan kepada seseorang agar memiliki karakter dan keberpihakan yang positif. Dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi , nilai-nilai yang di sampaikan adalah nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai yang menopang bekerjanya masyarakat atau bangsa yang demokratis. Nilai-nilai itu adalah : Kebebasan, Tanggungjawab, Kemandirian, Hak untuk menentukan diri sendiri, Partisipasi (turut menentukan) , Toleransi, Pertolongan agar bisa menolong diri sendiri, Pluralisme, Kemajuan, Perdamaian (M. Khoirun :1999 : 83-89).

Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan di era reformasi harus dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia menciptakan demokrasi , *good governance*, negara hukum dan masyarakat madani di Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia Untuk itu Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sangat penting artinya bagi bagi penumbuhan kultur demokrasi ( democratic culture ) di Indonesia (Azyumardi Azra, 2003 : 5). Sebagaimana dikatakan Benjamin Barber (1992) :  
 " Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai "(Margaret S. Branson, Dkk, 1999 :5)

#### B. Menuju Demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Merphin Panjaitan, *Pendidikan Kewarganegaraan* adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial. Sementara Soedijarto mengartikan *Pendidikan Kewarganegaraan* sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis (Azyumardi Azra, 2003 : 9).

Salah satu keunggulan demokrasi Amerika adalah ia didukung oleh kultur, nilai dan karakter warga yang memungkinkan proses-proses demokrasi dapat terus dikembangkan. Warga Amerika menyadari bahwa *civic education* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Kesadaran ini lahir dari keyakinan bahwa etos demokrasi tidak diwariskan, tetapi harus dipelajari. Seperti ditegaskan oleh Alexis de Toqueville, setiap generasi adalah manusia baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari kemampuan dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional (Margaret S. Branson, Dkk, 1999 :vi).

Sedangkan Zamroni (2003 : vi-viii) Amerika dapat menjadi bangsa yang demokratis semenjak awal 1830 an, sebab mereka memiliki kultur demokratis dan struktur sosial politik yang subur untuk tumbuhnya kultur tersebut. Kultur demokrasi paling tidak mengandung dua aspek, yaitu :

**Pertama**, berujud dalam sifat egaliter dan liberal sebagai sumber dari Etika Puritanisme yang kemudian berhasil disosialisasikan kepada para pendatang dari daratan Eropa. **Kedua**, moral "menahan diri yang bersumber dari ajaran agama Protestan. Kemampuan menahan diri ini amat diperlukan untuk mengimbangi adanya kebebasan, seperti kebebasan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan memilih, kebebasan bertindak dan berbagai bentuk kebebasan yang lain. Demokrasi memerlukan moral menahan diri, tanpa kemampuan menahan diri, demokrasi akan berubah menjadi democracy yang akan melahirkan tirani

Lebih lanjut Gabriel Almond (1996), dalam kesimpulannya tentang keterkaitan antara keberhasilan demokratisasi suatu bangsa dan keberadaan kultur dan struktur sosial politik yang demokratis, sebagai berikut :

1. Kultur demokrasi adalah kultur campuran, antara kebebasan/partisipasi di satu pihak dan norma-norma perilaku di pihak lain.
2. Kultur demokrasi bersumber pada kultur masyarakat secara umum, yang mengandung (a) social trust yang tinggi dan (b) *civiness*, kecenderungan kerja yang bersifat horisontal/ sederajat.
3. Kultur demokrasi senantiasa memerlukan dan berbasis masyarakat madani.
4. Seberapa jauh masyarakat memegang kultur demokrasi sangat tergantung pada perilaku pemerintah dalam berdemokrasi.

Karakter ini harus ditanamkan dan dibiasakan melalui kata-kata, pengajaran dan keteladanan. Artinya demokrasi bukan " mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya" tetapi harus selalu secara sadar direproduksi, dari generasi ke generasi.

Dengan kata lain, upaya membangun masyarakat yang demokratis harus diiringi dengan suatu rekayasa untuk membangun struktur sosial politik dan kultur yang demokratis.

*Pendidikan Kewarganegaraan* merupakan salah satu instrumen untuk membangun kultur demokratis.

Dalam membangun kultur demokrasi, Almond mengatakan bahwa suatu bangsa harus melewati tiga tahap sebagai berikut :



**Tahap pertama**, tahap pengembangan institusi yang demokratis. Tahap ini dalam batas-batas menciptakan kondisi sosial dan personalitas individu yang mendukung terwujudnya demokrasi.

**Tahap kedua**, merupakan suatu proses untuk mewujudkan sikap individu yang mendukung demokrasi. Pada awal reformasi, kiranya hampir sebagian besar warga bangsa bersikap pro demokrasi.

**Tahap ketiga** adalah merupakan upaya mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis (Zamroni, 2003 : viii).

### C. Komponen-komponen Utama Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :

#### 1. Pengetahuan Kewarganegaraan<sup>10</sup> (*civic Knowledge*)

Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau

konsep-konsep apa yang seharusnya diketahui oleh anak didik. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga materi pokok yaitu demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani. Ketiga materi inti tersebut dijabarkan menjadi bahan kajian dalam pembelajaran PKn yaitu : (!) Pendahuluan; (2) Identitas Nasional; (3) Negara; (4) Kewarganegaraan; (5) Konstitusi; (6) Demokrasi; (7) Otonomi daerah; (8) Good Governance; (9) Hak Asasi Manusia (HAM) dan (10) Masyarakat Nadani. (Azyumardi Azra : 2003 :11)

5

#### 2. Kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Jika seseorang mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan tapi perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu misalnya, seseorang harus paham dahulu tentang isu itu, sejarahnya, relevansinya dengan masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan bermanfaat tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk warga negara yang berpengetahuan, efektif dan bertanggungjawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. *The National Standards for civics and Government* dan *The Civics Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini sebagai berikut : kemampuan mengidentifikasi dan membuat deskripsi; menjelaskan dan menganalisis dan mengevaluasi; mengambil/menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu publik.

#### 3. Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*): meliputi :

- Menjadi anggota masyarakat yang independen
- Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik
- Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu
- Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana
- Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat .

Dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wahana pendidikan demokrasi harus mencakup:  
aspek kognitif, yaitu membangun pengetahuan politik setiap peserta didik;

aspek afektif yaitu membangun karakter, nilai-nilai yang diajarkan dan aspek psikomotorik yaitu membangun kecakapan peserta didik (kecakapan intelektual, berpikir kritis dan kecakapan partisipatoris).

#### **D. Penutup**

Secara kongkrit kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi; memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi serta berpikir kritis terhadap pemasalahannya; mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, serta menghormati supremasi hukum; mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik; dan memiliki pemahaman internasional mengenai masyarakat madani (Supriatnoko 2008; Jakarta : Penaku).

Cara paling strategis untuk „mengalami demokrasi dan menjadi *civilized* adalah melalui “pendidikan kewarganegaraan”. Di dalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewarganegaraan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Azyumardi Azra . 2003 . *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media

Margaret S. Branson, dkk.1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*, Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF)

M. Nur Khoirun, dkk.1999. *Pendidikan Politik bagi Warga Negara*. Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF)

Supriatnoko 2008; *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Penaku

Zamroni, 2003. *Civic Education. Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta : Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan The Asia Foundation (TAF)

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI

## ORIGINALITY REPORT

16%

## SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ppkn.ums.ac.id">ppkn.ums.ac.id</a> Internet	42 words — 3%
2	<a href="http://www.pps.unud.ac.id">www.pps.unud.ac.id</a> Internet	38 words — 3%
3	<a href="http://pendopoalhayah.blogspot.com">pendopoalhayah.blogspot.com</a> Internet	24 words — 2%
4	<a href="http://sman1grati.sch.id">sman1grati.sch.id</a> Internet	23 words — 2%
5	<a href="http://a-research.upi.edu">a-research.upi.edu</a> Internet	21 words — 1%
6	<a href="http://jihooji77.blogspot.com">jihooji77.blogspot.com</a> Internet	20 words — 1%
7	<a href="http://istb.ac.id">istb.ac.id</a> Internet	19 words — 1%
8	<a href="http://pkn.upi.edu">pkn.upi.edu</a> Internet	16 words — 1%
9	<a href="http://digilib.ump.ac.id">digilib.ump.ac.id</a> Internet	12 words — 1%
10	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet	9 words — 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON